

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 LATAR BELAKANG

Tanggal 10 Desember 2020, peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, 147 imam Gereja Katolik Papua dan Papua Barat, dalam satu gerakan menyampaikan seruan moral dan keprihatinan mendalam atas aneka kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi secara intensif, berulang dan meningkat dua tahun belakangan di wilayah itu dan telah memakan banyak korban, baik warga sipil maupun pemuka agama. Seruan itu menyasar sejumlah institusi mahapenting di republik ini, salah satunya Gereja Katolik Indonesia, yakni Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan Dewan Uskup Papua.

Seturut nada keprihatinan itu, Gereja (baca: para pemimpinnya) terkesan bungkam dan sama sekali tidak berani menyerukan keprihatinan publik terkait persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Suara kritis profetik para gembala Gereja atas tragedi kemanusiaan yang sudah cukup lama dialami umat Allah di wilayah itu tidak lagi berhembus kencang. Padahal, justru suara kenabian dan opsi keberpihakan merekalah corong bagi *the voice of the voiceless*, ‘suara dari yang tak bersuara’. Dalam situasi genting, justru perhatian, kepedulian dan keberpihakan pemimpin Gerejalah tempat berlindung. KWI dan para Uskup Papua dinilai tidak berani menyuarakan keadilan dan perlindungan atas martabat manusia dalam diri kaum Melanesia khususnya dan umat Tuhan pada umumnya di Tanah Papua ketika negara dirasakan tidak lagi menyediakannya bagi mereka.¹

Kami, para Pastor Papua ingin bertanya, mengapa Bapak-bapak Pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di Tanah Papua dalam rapat tahunan KWI? Ada apa dengan Tanah Papua ini? Kami berharap, merindukan, dan memohon, agar Bapak Kardinal dan Para Uskup se-Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi

¹ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/162214/gerakan-pastor-di-papua-yang-tak-direstui-para-uskup>.

terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di Tanah Papua, terutama Ras Melanesia yang sedang menuju ambang kepunahan.²

Seruan moral itu, oleh para uskup tidak direstui, ilegal dan tidak mewakili Gereja Katolik. Dalam pertemuan tertutup dengan pemerintah, para uskup mendukung eksistensi militer di wilayah itu, sikap yang justru bertolak belakang dengan salah satu tuntutan para imam. Seruan keprihatinan itu juga menyinggung KWI yang cepat merespon pembunuhan oleh teroris di Sulawesi dan sama sekali diam atas pembunuhan di Papua.³ “Para uskup Indonesia jangan tinggal diam atau tak mau tahu dengan kondisi di Papua.”⁴ Terkait situasi di Indonesia tahun-tahun belakangan ini, ketua KWI, Kardinal Suharyo menilai Indonesia masih aman. Tidak seperti di Filipina, di mana negara (Presiden Duterte) bertindak sangat keras atas warganya sendiri dan memicu aksi protes Gereja secara publik yang berujung pada ketegangan keduanya.⁵

Hemat penulis, pernyataan Kardinal Suharyo kurang benar seutuhnya jika dikaitkan dengan fakta gejolak sosial politik di tengah-tengah hidup bermasyarakat dan menggereja di Indonesia kini. Pernyataan Kardinal Suharyo barangkali hanya berangkat dari apa yang tampak di permukaan tanpa memeriksa lebih dalam dengan terjun ke dalam pergumulan hidup mereka yang hak-haknya dirampas, dilanggar atau tidak dipenuhi oleh negara. Kalaupun mengetahuinya, Kardinal Suharyo hampir pasti tidak akan berani bersuara secara tegas di depan publik, salah satu misalnya terkait persoalan yang diserukan oleh para imam di Papua. Berani berbicara jujur dan terbuka di sini bukan menyerang dan aksi makar tetapi mengakui fakta kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat, menyatakan sikap tegas, mengkritik dan menawarkan solusi dan dengan itu serentak memperlihatkan posisi keberpihakan dan kepedulian. Namun, terbukti lewat seruan moral ke-147 imam Katolik Papua, hal itu tidak dilakukan oleh para pemimpin Gereja Katolik Indonesia apalagi dibahas dalam sidang KWI.

² <https://jpicofmindonesia.org/2020/12/press-conference-moral-call-for-justice-and-truth-by-catholic-priests-in-tanah-papua/>.

³ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/162214/gerakan-pastor-di-papua-yang-tak-direstui-para-uskup>.

⁴ <https://majalah.tempo.co/read/opini/162201/editorial-seruan-pastor-papua-untuk-gereja-katolik?>

⁵ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/162214/gerakan-pastor-di-papua-yang-tak-direstui-para-uskup>.

Berhembusnya seruan moral para imam, terang bahwa Gereja Katolik Indonesia dalam diri para pemimpin sedang mengalami krisis terkait peran kritis profetiknya, yaitu kurangnya keberanian (*lack of courage*) dan kurangnya perlawanan (*lack of opposition*) untuk berbicara benar tentang situasi di Indonesia yang juga marak mengalami pelanggaran HAM. Krisis ini memperlihatkan suara kritis profetik Gereja sudah tumpul – jika tak mau dikatakan mati. Inilah yang sekaligus sekaligus menjadi sorotan utama karya ini.

Saat ini di Indonesia ada lakon-lakon diskriminasi, stigmatisasi, intoleransi, radikalisme dan terorisme. Ada pula pengkambinghitaman, penghinaan dan penyingkiran kelompok tertentu menurut suku, agama dan orientasi seksual dari panggung kehidupan. Di samping itu, masih sering terjadi pembungkaman suara-suara kritis oleh penguasa, kebijakan dan sistem yang sangat tidak ramah terhadap kaum kecil dan miskin. Lalu perilaku koruptif para elit politik yang seolah tak ada habisnya bahkan di masa pandemi covid-19. Kemudian, atas nama pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi di berbagai daerah rupanya terjadi pelanggaran HAM (hak ekonomi, sosial, budaya).⁶

Tak ketinggalan, krisis ekologi yang kini menjadi keprihatinan bersama dan menuntut keterlibatan semua pihak tanpa terkecuali, makin menambah daftar panjang rupa-rupa persoalan krusial dan aktual yang menuntut daya kritis dan pergumulan Gereja Indonesia, dan masih ada banyak krisis aktual lainnya, terlihat maupun terselubung dalam rupa-rupa regulasi dan sistem. KWI lewat Kardinal Suharyo masih sempat membela diri, bahwa peran kenabian Gereja hanya pada isu moral semata, seolah antara moral dan isu-isu kemanusiaan, keadilan, kebebasan dan seterusnya, tidak saling terkait. “Gereja bisa apa? Kami hanya bisa berdoa”, demikian ketua KWI.⁷

Lakon ketua KWI dan para uskup sebetulnya membuka selubung keterperosokan Gereja (para pemimpin) ke dalam kepentingan dirinya sendiri (*their own self-interest*). Hal ini terendus dengan mengobservasi kecenderungannya mencari aman. Mungkin Gereja merasa diri sebagai minoritas

⁶ *Tempo*, 21-27 Desember 2020, dalam rangka memperingati hari HAM sedunia, *Tempo* menyajikan liputan khusus pelanggaran hak-hak sipil akibat pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi periode kedua halaman 87-117.

⁷ <https://majalah.tempo.co/read/nasional/162214/gerakan-pastor-di-papua-yang-tak-direstui-para-uskup>.

yang terancam setiap saat, sehingga harus selalu dekat pada kekuasaan, akrab agar terlindungi dari aneka ancaman dan gangguan semisal pembentukan negara Islam. Untuk itu, spirit nasionalisme harus dihembuskan, dan ini yang paling disukai termasuk oleh Gereja, salah satunya agar ia bisa menyanyikan lagu Gregorian-nya dengan khusus. Banyaknya perayaan liturgi yang sukses ditunaikan pun menjadi barometer hidup menggereja. Perilaku macam ini mendidik dan membentuk Gereja menjadi sosok *good boy* (anak sopan), ‘anak manis’ penguasa yang tak boleh kritis, namun cukup taat saja.⁸

Padahal, justru karena kecintaan pada bangsa, sikap kritis Gereja tidak mesti dikebiri. Tidak segala wacana tentang nasionalisme itu jujur. Yang dimaksudkan di sini adalah di mana suara kritis profetik Gereja di depan publik terkait kekerasan dan pelanggaran HAM salah satunya termasuk di Papua oleh aparat negara. Jika Gereja selama ini diam, maka bukan nasionalisme sebetulnya, tetapi pembusukan nasionalisme, dan Gereja ikut dalam proses pembusukan itu. Suara kritis profetik Gereja di ruang publik terkubur.⁹

Gereja dalam diri pemimpin, tampaknya lebih memilih hidup tenang – sebenarnya terpaksa, ketimbang harus memprotes perbuatan negara yang bisa saja menempatkan Gereja sebagai musuh. Gereja lebih merawat diri sebagai jembatan dengan kekuasaan ketimbang menajamkan keberpihakan kepada warga yang tertindas. Apakah Gereja lalu bersikap pragmatis? Bisa jadi. Gereja, pada saat yang sama juga meninabobokan iman dan kesadaran umat – tegasnya mengajarkan sikap diam dan pasrah di hadapan ketidakberesan dan krisis yang menimpa masyarakat terkhusus kaum lemah, minoritas termasuk diri Gereja. Gereja Katolik Indonesia *mungkin* pernah berbicara tentang pelanggaran HAM, entah ringan maupun berat, namun hanya tinggal dalam rumusan, berhenti di ruang sidang dan tidak dihembuskan ke publik sebagai roh yang membebaskan. Kondisi ini makin memprihatinkan manakala melihat gaya bicara pemimpin

⁸ Emanuel Gerrit Singgih, *Mengantisipasi Masa Depan: Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm. 108-109, 135.

⁹ Frans Magnis-Suseno, *Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Penerbit OBOR, 2004), hlm. 220-221.

Gereja yang kurang berani dan kurang tegas, di samping juga fakta bahwa hierarki dalam Gereja sangat rigid dan kaku.¹⁰

Bungkamnya para pemimpin Gereja menimbulkan kecurigaan, jang-jangan Gereja sebagai minoritas takut dituduh pengacau, *agitator* dan *subversive* jika melayangkan protes kepada negara atas penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan negara atas warga, karenanya lebih baik menjadi Gereja Katolik Indonesia *yes men*, taat dan penurut bahkan mengekor pada penguasa daripada menanggung derita dan salib sebagai upah murid Kristus yang sejati. Padahal, Gereja semakin mampu terlibat dan bersuara atas mereka yang menderita jika ia semakin mendalam belajar dari pengalaman Salib Yesus dan dekat dengan realitas penderitaan, terlebih mereka yang menjadi korban. Itu berarti derita dan salib korban, adalah juga milik Gereja.¹¹

Apakah Gereja menghindari ini? Ataukah, situasi Indonesia masih aman sebagaimana ucapan Kardinal Suharyo, sehingga tidak mendesak ditanggapi secara tegas dan terbuka? Gereja lupa akan komitmennya untuk bertobat terus menerus sebagaimana pesan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2004: kesediaan untuk berkorban, melayani tanpa pamrih dan menjadi saksi injil (*martyria*).¹²

Akarnya adalah sikap Gereja yang lebih menjaga relasi dan merawat privilese di samping juga berpikir akan identitas minoritasnya yang tidak boleh berubah di negara ini. Mendukung pemerintahan yang sah adalah bagian dari iman, namun tidak mendewakannya apalagi mengorbankan sikap kritis dan mendiamkan ketidakadilan. Inilah yang terjadi dengan Gereja Katolik Indonesia kini. Alasannya agar negara aman, tapi sebetulnya tidak aman. Umat harus taat total pada suara gembala! Selain itu, mungkin juga pemimpin Gereja ikut dalam

¹⁰ “Dalam kasus Gereja Katolik, ada 147 pastor yang sudah cukup lama melakukan kerja advokasi, tetapi tidak mendapatkan ruang yang cukup ketika itu dibawa kepada struktur hierarki Gereja Katolik karena secara institusi Gereja Katolik sangat rigid, sangat hierarkis sekali,” kata Hipolitus Wangge, Akademisi *Australian National University* (ANU) dan penggiat isu Papua. “Jadi kalau ada advokasi-advokasi tertentu itu justru mungkin akan dianggap membahayakan hubungan antara Gereja Katolik dan Pemerintah (Indonesia).” (<https://www.jpnn.com/news/147-pastor-papua-meminta-semua-pihak-hentikan-kekerasan?page=4>).

¹¹ Telesphorus Krispurwana Cahyadi, *Gereja dan Pelayanan Kasih* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 244-245.

¹² *Ibid.*, hlm. 239.

kepentingan penguasa dengan dalil demi *bonum commune*. Jika demikian, maka Gereja ikut dalam aneka bentuk kekerasan.

Ditilik dari latar belakang¹³ dan dari perspektif tertentu, seruan moral ke-147 imam Katolik versus kurangnya keberanian dan tumpulnya sikap kritis pimpinan Gereja Katolik Indonesia, kurang lebih menyerupai pengalaman pergumulan Dietrich Bonhoeffer di Jerman ketika Adolf Hitler berkuasa di negara itu. Di tengah krisis multi dimensi yang melanda Jerman, Hitler berjanji mengembalikan kejayaan Jerman seperti pada era Bismarck dan Wilhelmine, dan mengatasi kekacauan ekonomi dan politik di dalam negeri serta memulihkan harga diri bangsa Jerman di mata dunia internasional.¹⁴ Hitler juga menyatakan sumpah setia kepada Tuhan, padahal ia sendiri tidak percaya Tuhan. Kesetiaannya kepada warga Jerman (*Volk*), serta memimpin dengan hati nurani adalah janji dan komitmennya sebagai pemimpin Jerman yang baru. Di bawah pemerintahannya, kekristenan akan menjadi dasar moralitas dan etika kolektif Jerman. Akan tetapi, pada kenyataannya, ia berbohong.¹⁵

Meski demikian, terlepas dari segala propaganda dan kata-kata penghiburan yang kosong, faktanya Hitler disambut dan didukung oleh hampir seluruh warga Jerman, tak terkecuali *the German Evangelical Church*, ‘Gereja Injili Jerman’ (GIJ)¹⁶ yang sejak lama telah turut menikmati posisi istimewa di dalam negara. Dukungan Gereja ini kemudian menyeretnya ke dalam konflik internal, yang dikenal dengan ‘*Church Struggle*’ (*Kirchenkampf*).¹⁷ Di atas semua itu, fakta yang tak terbantahkan adalah kurangnya oposisi Gereja terhadap segala kebijakan Hitler

¹³ <https://jpicofmindonesia.org/2020/12/press-conference-moral-call-for-justice-and-truth-by-catholic-priests-in-tanah-papua/>

¹⁴ John A. Moses, “Bonhoeffer’s Germany: The Political Context” dalam John W. de Gruchy (ed.), *The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm.17.

¹⁵ Erick Metaxas, *Bonhoeffer. Pastor, Martyr, Prophet, Spy* (Nashville Dallas: Thomas Nelson, 2010), hlm. 143.

¹⁶ Gereja Injili Jerman merujuk pada aliran *Lutheran, Reformed*, dan *United denominations or traditions* (Hannah D’ Anne Comodeca, “No ‘Spoke in the Wheel’: The German Evangelical Church and the Nazi State”. Tesis. Oklahoma: Oklahoma State University, 2012. Hlm. 9.

¹⁷ *Church Struggle (Kirchenkampf)* mengacu pada konflik di dalam Gereja Injili Jerman antara Gereja Pengakuan Iman dan Gereja negara, *Reichskirche*, yang menerima kebijakan gerejawi Nazi. Hitler menggunakan kebijakan ini dalam usahanya untuk mendominasi dan mengontrol Gereja Injili dengan mengintegrasikannya ke dalam struktur birokrasi Nazi. Hal yang dipertaruhkan dalam diperjuangan ini adalah keaslian dan integritas Gereja Protestan untuk setia kepada Kitab Suci dan pengakuan iman yang bersejarah. (John W. de Gruchy (ed.), *The Cambridge Companion to Dietrich Bonhoeffer* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. xxi).

yang menindas dan menginjak-injak martabat manusia dalam diri kaum keturunan Yahudi. Misi pemuridan dan vokal kenabian Gereja pun menjadi pedang yang berkarat – *rusty swords*.

Meski konteks historisnya berbeda, namun persoalan-persoalan aktual yang digumuli bangsa saat ini dan kediktatoran Hitler, mengkomunikasikan pesan yang sama, yaitu penindasan oleh kekuasaan dan kelompok mayoritas terhadap kaum kecil dan minoritas dan ketidakberanian pemimpin Gereja Katolik Indonesia berbicara tegas secara publik. Di Jerman, Hitler menjadikan dirinya sebagai pusat kepemimpinan nasional (*Führer*). Undang-Undang diskriminatif yang diciptakannya, *Aryan clause*¹⁸ selain melarang semua keturunan Yahudi memegang jabatan apa pun di Jerman, pun berakibat fatal pada pengincaran dan pemusnahan kaum Yahudi (*genocide*). *Aryan clause* didukung kelompok mayoritas mapan Gereja Kristen Jerman yang sebagian besar adalah para pendeta dan warga Gereja berkebangsaan Jerman yang menyebut dirinya Orang Kristen Jerman, di antara minoritas yang menentanginya, yaitu Gereja Pengaku Iman, yang pada akhirnya pun mengecewakan Bonhoeffer akibat kendurnya oposisi.

Bonhoeffer adalah salah satu teolog terkemuka kelompok minoritas ini. Meski harus berkonflik selama hidup dan karir teologisnya, tabrakan ini adalah produk dari perlawanannya yang gigih atas penindasan dan ketidakadilan. Bonhoeffer menghayati imannya dalam krisis dan keributan di ranah publik tidak hanya dengan institusi negara tetapi juga terutama institusi Gereja. Gereja Injili Jerman terperosok ke dalam kepentingannya dan terombang-ambing karena keseringan mencari privilese dari rezim. Kedekatan ini lalu membuatnya pro Hitler dan bersekutu dengan Nazi. Lewat pengaruh dan bantuan Gereja Injili Jerman, Hitler dielu-elukan sebagai pemimpin besar rakyat. Gereja absen saat hak dan martabat manusia dalam diri kaum Yahudi dilindas negara. Tugas pemuridan dan

¹⁸ Klausula Aryan mengacu pada Paragraph 7 dari Undang-Undang Konstitusi untuk Rekonstruksi Pegawai Negeri Sipil Profesional yang disahkan oleh *Reichstag German* pada tanggal 7 April 1933, yang melarang orang Yahudi dan siapa pun keturunan Yahudi dari penunjukkan apa pun untuk jabatan publik mana pun. Hal ini juga berlaku untuk pendeta di Gereja Injili Jerman. Klausula Arya menjadi isu penting dari Perjuangan Gereja tahun 1930-an, ketika Sinode Brown dari Gereja Injili secara resmi mengadopsinya sebagai syarat untuk diterima menjadi pelayan yang ditahbiskan. Sinode Brown sendiri merujuk pada Sinode Umum Prusia yang berlangsung pada September 1933, disebut demikian karena seragam coklat yang dikenakan oleh mayoritas perwakilan di sinode yang mendukung Nazi. Pada sinode inilah sumpah kesetiaan terhadap Hitler dan klausula Arya diadopsi dan Uskup Nasional, Ludwig Muller, terpilih. (John W. de Gruchy, *op. cit.*, hlm. xx-xxi).

daya kritis Gereja berhasil dijinakkan oleh ‘teologi Nazi’¹⁹ sehingga lupa posisi keberpihakannya.

Letak kesamaan dari kedua konteks historis ini. *Pertama*, tindakan diskriminatif, represif hingga persekusi. Hak-hak dasar warga sipil akan hidup yang damai tanpa rasa takut sulit didapatkan. *Kedua* sekaligus terpenting, yaitu kebisuan Gereja di hadapan aksi kejahatan dan ketidakadilan yang marak terjadi terutama oleh penguasa. Suara profetis Gereja tidak lagi tajam. Apakah ini terkait dengan kedekatannya dalam diri para uskup dengan rezim Jokowi?²⁰ Di samping menghindari konflik relasi dengan negara sebagaimana analisis Hipolitus, Gereja mungkin berpikir, negara saja yang bertindak dengan caranya, dan dengan itu ia (Gereja) cukup mengulangi seruan yang sama, ‘Gereja pro kehidupan dan memperjuangkan martabat manusia’, tetapi tetap mandul dalam aksi konkret. Kemandulan Gereja melanggengkan aksi kekerasan dan penindasan oleh negara, tetapi juga terutama menyebabkan Gereja sendiri tidak berani dan tidak mampu melakukan autokritik atas dirinya. Dan justru model Gereja inilah yang membuat Bonhoeffer gerah dan menyerangnya secara sangat tajam dan keras dalam seruan-seruan teologisnya.

Bertolak dari visi teologis Bonhoeffer, *Costly Discipleship*, juga dari persoalan-persoalan sosial etis yang telah disentil di atas, maka penulis menuangkannya dalam tulisan ilmiah ini dengan judul: SPIRIT PEMURIDAN DIETRICH BONHOEFFER – MENGIKUT YESUS SEBAGAI *COSTLY DISCIPLESHIP* DAN RELEVANSINYA BAGI HIDUP MENGGEREJA MASA KINI DI INDONESIA.

¹⁹ *It's been our misfortune to have the wrong religion. Why didn't we have the religion of the Japanese, who regard sacrifice for the Fatherland as the highest good? The Mohammedan religion too would have been much more compatible to us than Christianity. Why did it have to be Christianity with its meekness and flabbiness?* — Adolf Hitler. Hitler melihat Kekristenan sebagai tumpukan besar omong kosong mistikal yang ketinggalan zaman. Namun yang paling menjengkelkan Hitler adalah bukan karena hal itu adalah omong kosong yang tidak membantunya maju. Baginya Kekristenan berkhotbah tentang “kesabaran dan kelemahlembutan”, dan ini sama sekali tidak berguna bagi ideologi Nazi yang mengkhotbahkan tentang “kekasaran dan kekuatan”. Pada waktunya, Hitler mengalami, bahwa Gereja-Gereja akan mengubah ideologi mereka dan ia akan melihatnya. (Eric Metaxas, *op. cit.*, hlm. 165-166).

²⁰ <https://majalah.tempo.co/read/opini/162201/editorial-seruan-pastor-papua-untuk-gereja-katolik>.

1. 2 RUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan tesis ini, penulis meneliti spirit pemuridan Dietrich Bonhoeffer dalam teologinya mengikut Yesus sebagai *Costly Discipleship* dan relevansinya bagi spirit hidup menggereja masa kini. Persoalan pokok yang hendak ditelusuri jawabannya adalah apakah itu spirit pemuridan Bonhoeffer – mengikut Yesus sebagai *Costly Discipleship*? Di samping masalah pokok ini, ada pula beberapa hal pendukung lain yang akan dibahas dalam kaitan dengan persoalan pokok di atas.

Pertama, siapakah Dietrich Bonhoeffer, dan apa pandangannya tentang Gereja, komunitas Kristen serentak murid Kristus yang harus menghidupi *Costly Discipleship*?

Kedua, bagaimana ia menghayati spiritualitas keterlibatannya sebagai *Costly Discipleship* berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, keadilan, kebebasan, kesetaraan dan perdamaian?

Ketiga, sejauh mana spiritualitas terlibat Dietrich Bonhoeffer – mengikut Yesus sebagai *Costly Discipleship* merasuki Gereja dalam aktus keterlibatannya dewasa ini teristimewa berhadapan dengan masalah-masalah aktual yang saat ini sedang melilit masyarakat Indonesia?

1. 3 TUJUAN PENULISAN

Secara umum, penulisan tesis ini terarah pada usaha untuk mengenal Dietrich Bonhoeffer: teolog, pastor, martir, nabi, mata-mata dan memahami spirit pemuridannya - mengikut Yesus sebagai *Costly Discipleship*, pandangan-pandangannya tentang kualitas hidup pemuridan Gereja sebagai *Costly Discipleship* dan bagaimana ia sendiri menghayati panggilan pemuridan dan spiritualitas terlibatnya sebagai *Costly Discipleship* di hadapan merosotnya moralitas dan mutu hidup Gereja teristimewa berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan perdamaian di negaranya, Jerman yang saat itu selama Perang Dunia Kedua berada di bawah kendali kekuasaan Nazi dan Adolf Hitler.

Selain tujuan umum di atas, secara lebih tegas penulisan tesis ini juga dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar

Magister Teologi dengan pendekatan kontekstual pada Program Studi Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.

1. 4 MANFAAT STUDI

Adapun tema penulisan tesis ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak berikut.

Pertama, bagi segenap umat Kristen, para murid Kristus, khususnya warga Gereja Katolik Indonesia, yakni pimpinan dan seluruh umat Allah agar senantiasa menyadari dimensi panggilan pemuridannya (*discipleship*) sebagai murid Yesus dalam dunia untuk meneruskan semangat keberpihakan Yesus terutama kepada orang-orang kecil dan lemah, mereka yang tertidas dan tidak mempunyai penolong. Dengan itu, mereka tidak hanya berkuat pada urusan struktur dan ritus serta ketaatan pada aturan-aturan dan perintah-perintah manusiawi, melainkan terutama berani bertindak benar, berpihak dan menolak diam membela orang-orang lemah, dan bahkan menceburkan dirinya ke dalam lumpur krisis dan pergumulan dunia dan masyarakat manusia masa kini, guna mengangkat martabat orang-orang kecil yang tertidas akibat sistem dan kebijakan yang tidak adil. Dengan demikian, tegaklah nilai-nilai keadilan, damai, persaudaraan, kesetaraan, pembebasan dan sukacita.

Kedua, bagi siapa saja yang berkendak baik yang tidak hanya berhenti pada rasa peduli berhadapan dengan penderitaan dan pergumulan orang-orang kecil dan kelompok-kelompok rentan, melainkan juga terlibat aktif dan turut merasa bertanggungjawab atas kemalangan dan penolakan yang dialami kaum terpinggirkan lewat dialog, advokasi bahkan bertindak radikal manakala berhadapan dengan penguasa yang represif secara terang-terangan lewat tindakan tertentu maupun terselubung dalam seperangkat kebijakan dan aturan yang diskriminatif dan merugikan kaum kecil, kelompok-kelompok rentan serta kaum minoritas baik suku maupun agama.

Ketiga, mendorong penulis sebagai seorang calon imam biarawan misionaris SVD untuk tidak sajaewartakan Sabda Allah yang membebaskan lewat mimbar khotbah, tidak memberikan perhatian dan pelayanan melulu pada ritus-ritus yang bersifat sakramental tetapi juga terutama menjangkau dan menyentuh para korban kemanusiaan, bahkan tidak hanya berteriak atas nama

mereka, melainkan memberdayakan mereka agar ikut memperjuangkan hak dan suara mereka sendiri.

1. 5 METODE PENULISAN

Dalam usaha mengerjakan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan menganalisis teks dan kritik historis khususnya sejarah pemuridan Bonhoeffer dan refleksi-refleksi teologisnya dalam perlawanan terhadap Nazi dan Hitler serta Gereja Kristen Jerman. Penulis berusaha mendapatkan buku-buku utama karya Bonhoeffer pun riwayat hidup pemuridannya yang diramu sejumlah penulis lain lalu juga sejumlah buku penunjang lainnya. Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menjabarkan pandangan-pandangan teologis dan misi resistensi Bonhoeffer guna mendukung landasan teoretis dan bingkai analisis tentang Bonhoeffer dan misi perlawanannya pada masa itu dan merefleksikannya serta mengkonteksikannya dengan kehidupan menggereja masa kini di Indonesia.

1. 6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini dijabarkan menurut skema pembahasan berikut.

Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Kedua, pembahasan tentang riwayat hidup dan karya pemuridan Dietrich Bonhoeffer mengikut Kristus sebagai *Costly Discipleship* dalam hidup bermasyarakat dan menggereja.

Ketiga, pembahasan difokuskan pada usaha mendalami pemikiran Dietrich Bonhoeffer tentang *Costly Discipleship*.

Keempat, pembahasan tentang relevansi spiritualitas terlibat Dietrich Bonhoeffer – mengikut Yesus sebagai *Costly Discipleship* bagi hidup menggereja di Indonesia dewasa ini. Bagaimana spirit hidup pemuridan Bonhoeffer dan *Costly Discipleship* menginspirasi Gereja dalam aksi profetisnya teristimewa berhadapan dengan soal-soal aktual saat ini.

Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran praktis bagi Gereja dalam menjalankan misi keselamatan Allah dalam dunia melalui aktus praksis.